

## PENGARUH PENDAPATAN ASLI DAERAH, DANA ALOKASI UMUM DAN DANA BAGI HASIL TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOMI DI PROVINSI ACEH

Rahmah AR dan Drs. Basri Zein M.Si, Ak, CPA

Fakultas ekonomi dan bisnis, program studi akuntansi, universitas syiah kuala  
Rahmah.AR29@gmail.com

### ABSTRACT

*This study aims to examine the influence of local income, general allocation fund, and revenue sharing fund on Economic Growth in Aceh province. The data used in this research is secondary data. Census method and time series are used with a population of 23 districts/cities in Aceh province during the observation period 2011- 2014. Data analysis used is multiple linear analysis and hypothesis testing uses the coefficient of determination (adjusted  $R^2$ ), partial significance test (t), and significant simultaneous test (F).*

*This study uses the independent variables: local income, general allocation fund, and revenue sharing fund, and the dependent variable: Economic Growth. The results showed that (1) the local income, general allocation fund, and revenue sharing fund simultaneously affect economic growth, and (2) local income, general allocation fund, and revenue sharing fund partially affect economic growth in the province.*

**Keywords:** *Economic Growth, local income, General Allocation Fund, and revenue sharing fund*

### PENDAHULUAN

Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah memberikan kewenangan penuh pada tiap-tiap daerah baik provinsi, kabupaten/kota untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat, kebijakan tersebut adalah Otonomi Daerah. Ditetapkannya otonomi daerah baik di provinsi, kabupaten/kota memberikan keleluasaan kepada pemerintah daerah setempat untuk menggali potensi-potensi sumber keuangan di daerahnya. Semakin banyak sumber-sumber keuangan yang digali di suatu daerah, maka akan semakin meningkat pendapatan daerah yang semestinya diikuti dengan meningkatnya pertumbuhan ekonomi di daerah tersebut (Dwirandra, 2013).

Perekonomian Aceh tahun 2014 yang diukur berdasarkan produk domestik bruto (PDRB) atas dasar harga berlaku mencapai Rp 130,45 triliun dan PDRB perkapita mencapai Rp 26,59 juta atau US\$ 2.338,75. Ekonomi Aceh tahun 2014 tumbuh 1,65 persen melambat dibandingkan tahun 2013 sebesar 2,83 persen dengan migas. Pertumbuhan ekonomi Aceh tanpa migas adalah 4,13 persen, sedikit melambat dari tahun 2013 yang sebesar 4,40 persen. Dari sisi produksi, pertumbuhan tertinggi dicapai oleh lapangan usaha jasa perusahaan sebesar 8,68 persen. Dari sisi pengeluaran pertumbuhan tertinggi dicapai oleh impor luar negeri sebesar 67,57 persen (Berita Resmi BPS 2015).

Perekonomi Aceh triwulan I 2015 merupakan yang terburuk sejak tahun 2014. Ekonomi Aceh saat ini mengalami penurunan paling tinggi bila dibandingkan provinsi lain, yaitu sebesar 1,88 persen. Penyebab penurunan tersebut dikarenakan menurunnya produksi migas baik di pertambangan maupun industri dan dilihat dari sisi pengeluaran disebabkan oleh konsumsi pemerintah yang juga turun 39,42 persen. Selain itu perekonomian Aceh pada triwulan ini masih sangat tergantung dengan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Aceh (APBA) hal ini minimnya serapan APBA selama triwulan I 2015, menyebabkan ekonomi Aceh tumbuh negatif dalam tiga bulan tersebut. Triwulan I realisasi anggaran masih rendah, sebenarnya realisasi anggaran harus dipacu lagi karena realisasi anggaran APBA dan APBN menjadi pendorong utama geraknya ekonomi di Aceh. Meskipun Aceh masih mempunyai alokasi dana migas dan otsus tetapi besarnya sudah jauh berbeda, dimana migas Aceh masih ekspor, tentu pembagian dari hasil tersebut masih kita dapatkan. Perbandingannya karena dulu Aceh sangat tergantung pada migas, hampir semua provinsi yang tergantung pada migas pertumbuhan ekonomi pada triwulan I 2015 turun semua. Pertumbuhan ekonomi yang minus terjadi pada seluruh lapangan usaha kecuali, pertanian, kehutanan, dan perikanan; jasa keuangan, *real estate* dan jasa lainnya. Bila dilihat secara tahunan (triwulan I 2014- triwulan I 2015) pertumbuhan ekonomi Aceh juga turun 1,88 persen dengan migas dan tumbuh 4,61

persen jika dihitung tanpa komponen migas (BPS Aceh 2015)

Provinsi Aceh dengan luas wilayah 5.677.081km<sup>2</sup> yang terdiri dari 18 kabupaten dan 5 kota, 289 kecamatan, 761 mukim dan 6.464 gampong merupakan daerah struktur geografis dan kultur sosial ekonomi masyarakat yang berbeda. Keadaan ini menyebabkan proses pembangunan daerah kabupaten/kota di Provinsi Aceh yang relatif berbeda antara 1 wilayah dengan wilayah yang lainnya, sehingga menyebabkan berbedanya nilai PDRB yang diterima dari masing-masing daerah kabupaten/kota. Laju pertumbuhan ekonomi dihitung dengan menggunakan data PDRB atas dasar harga konstan. Untuk menghitung laju pertumbuhan riil dalam satu kurun waktu lazimnya digunakan tahun dasar yang sama dan menggunakan perhitungan tanpa migas (Katalog BPS, 2014).

Pertumbuhan ekonomi suatu daerah dicerminkan dari angka produk domestik regional bruto (PDRB). PDRB adalah jumlah nilai tambah barang dan jasa yang diproduksi dari seluruh kegiatan perkonomian di seluruh daerah dalam tahun tertentu atau periode tertentu dan biasanya satu tahun. Tingkat pertumbuhan ekonomi suatu daerah diprosikan dengan PDRB atas dasar harga konstan menggunakan harga pada tahun tertentu sebagai tahun dasar untuk mengeliminasi faktor-faktor kenaikan harga (Dwirandra, 2013).

Pemerintah Daerah yang berhasil menjalankan pembangunan daerah dan meningkatkan kesejahteraan rakyat tidak terlepas dari keberhasilan mengelola APBD secara efektif dan efisien. Sebaliknya, pengelolaan APBD yang buruk dapat menghambat kinerja pemda dalam peningkatan pembangunan daerah dan kesejahteraan rakyat. Persoalan yang muncul adalah saat pemda dihadapkan pada jumlah belanja daerah yang kecil tetapi harus menanggung kebutuhan besar. Sementara pada saat bersamaan pemda kurang memiliki kreativitas mengelola APBD, sehingga pemerintah pada jenjang di atasnya (pemprov atau pusat) tidak optimal dalam mengelola APBD (Suara Merdeka 2012).

Berdasarkan pendahuluan di atas, maka dilakukan suatu penelitian dengan judul: **“Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum dan Dana Bagi Hasil terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Aceh”**.

## KAJIAAN PUSTAKA

### Pertumbuhan Ekonomi

Sukirno (2013:9) menyatakan bahwa Pertumbuhan Ekonomi adalah proses kenaikan output perkapita yang terus menerus dalam jangka panjang.

Pertumbuhan ekonomi tersebut merupakan salah satu indikator keberhasilan pembangunan. Dengan demikian makin tingginya pertumbuhan ekonomi biasanya makin tinggi pula kesejahteraan masyarakat, meskipun terdapat indikator yang lain yaitu distribusi pendapatan.

### Produk Domestik Regional Bruto

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) adalah jumlah nilai produk barang dan jasa yang dihasilkan oleh unit-unit produksi yang beroperasi pada suatu daerah dalam jangka waktu tertentu. Atau apabila ditinjau dari segi pendapatan merupakan jumlah pendapatan yang diterima oleh faktor-faktor produksi yang dimiliki oleh penduduk di wilayah tersebut yang ikut serta dalam proses produksi dalam jangka waktu tertentu. Hasil perhitungan PDRB disajikan atas dasar harga berlaku merupakan jumlah seluruh nilai barang dan jasa akhir dihasilkan oleh unit produksi dalam periode satu tahun dinilai dengan harga tahun yang bersangkutan (Katalog BPS, 2014).

### Pendapatan Asli Daerah

Dalam Undang-Undang No 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, disebutkan bahwa pendapatan asli daerah adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan perundang-undangan. Pada pasal 3, disebutkan PAD bertujuan memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk mendanai pelaksanaan otonomi daerah sesuai dengan potensi daerah sebagai perwujudan desentralisasi. Pendapatan asli daerah (PAD) adalah penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber dalam wilayah sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Djaenuri, 2012:88).

### Dana Bagi Hasil

Peraturan Pemerintah No. 55 tahun 2005 tentang Dana Perimbangan Pasal 1 ayat 9, menyebutkan bahwa Dana Bagi hasil adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah berdasarkan angka persentase untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Dana Bagi Hasil bersumber dari pajak dan sumber daya alam, dana bagi hasil alam sesuai dengan penetapan dasar perhitungan dan daerah penghasil serta ketentuan lebih lanjut mengenai Dana Bagi Hasil diatur dengan peraturan pemerintah.

### Dana Alokasi Umum

Peraturan-Pemerintah No. 55 tahun 2005 tentang Dana Perimbangan Pasal 1 ayat 23, menyebutkan bahwa Dana alokasi umum adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan

keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.

Penggunaan dana alokasi umum ditetapkan oleh daerah. Penggunaan dana alokasi umum dan penerimaan umum lainnya dalam APBD harus tetap dalam rangka pencapaian tujuan pemberian otonomi kepada daerah, yaitu peningkatan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat yang semakin baik, seperti pelayanan di bidang kesehatan dan pendidikan (Djaenuri, 2012:103).

**KERANGKA PEMIKIRAN**

**Hubungan Pendapatan Asli Daerah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi**

Semakin tinggi PAD suatu daerah, maka tingkat ketergantungan fiskal daerah tersebut kepada pusat semakin berkurang. Selanjutnya daerah lebih leluasa dan fleksibel dalam merencanakan alokasi anggaran sesuai dengan agenda ekonominya. Melalui belanja pembangunan/infrastruktur, ataupun belanja lainnya, PAD sebagai sumber pembiayaan daerah diharapkan mampu menciptakan sejumlah aktivitas ekonomi baru dalam masyarakat. Dengan meningkatnya aktivitas ekonomi pada masyarakat, akan terjadi peningkatan sejumlah output barang dan jasa yang diikuti pula dengan meningkatnya jumlah uang beredar dari segi pembelanjaan yang dilakukan oleh pemerintah daerah. Selanjutnya hal tersebut akan meningkatkan nilai PDRB dan tingkat kesejahteraan masyarakat. Penelitian dilakukan oleh Dwirandra dan Putu Candra (2014) menyimpulkan bahwa dengan meningkatkan PAD, daerah dapat lebih mampu dalam memberikan fasilitas pelayanan publik yang lebih baik untuk masyarakat lokal dan ketersediaan infrastruktur publik tersebut akan menjadi kunci dari pertumbuhan seiring dengan meningkatnya produktivitas.

**Hubungan Dana Alokasi Umum terhadap Pertumbuhan Ekonomi.**

Setiap daerah mempunyai kemampuan yang tidak sama dalam mendanai kegiatan-kegiatannya, hal ini menimbulkan ketimpangan fiskal antara daerah satu dengan daerah lainnya. Oleh karena itu, untuk mengatasi ketimpangan fiskal ini pemerintah mengalokasikan dana yang bersumber dari APBN untuk mendanai kebutuhan daerah dalam pelaksanaan desentralisasi. Salah satu dana perimbangan dari pemerintah ini adalah Dana Alokasi Umum (DAU) yang pengalokasiannya menekankan aspek pemerataan dan keadilan yang selaras dengan penyelenggaraan urusan pemerintah (UU No. 23/2014). Penelitian Endrawati, dan Maryati(2010) menyimpulkan DAU berpengaruh signifikan positif terhadap pertumbuhan ekonomi, hal ini disebabkan peran DAU sangat signifikan karena belanja daerah lebih didominasi dari jumlah DAU. Setiap DAU yang diterima pemerintah

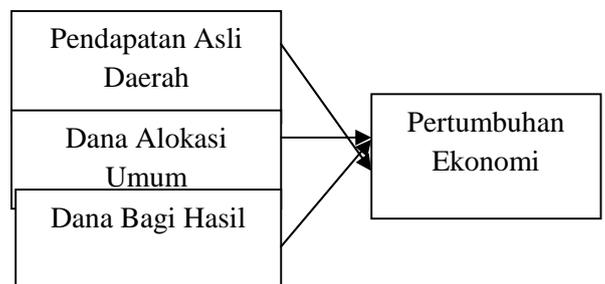
daerah akan ditunjukkan untuk belanja pemerintah daerah, salah satunya adalah belanja modal. Hal ini tidak jauh berbeda dengan peran PAD sebagai sumber pembiayaan bagi pembangunan sarana dan prasarana infrastruktur yang akan berdampak pada pertumbuhan ekonomi daerah.

**Hubungan Dana Bagi Hasil terhadap Pertumbuhan Ekonomi.**

Peraturan Pemerintah No. 55 tahun 2005 tentang Dana Perimbangan Pasal 1 ayat 9, menyebutkan bahwa Dana Bagi hasil adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah berdasarkan angka persentase untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Dana Bagi Hasil bersumber dari pajak dan sumber daya alam, dana bagi hasil alam sesuai dengan penetapan dasar perhitungan dan daerah penghasilan serta ketentuan lebih lanjut mengenai Dana Bagi Hasil diatur dengan peraturan pemerintah.

Bugis (2012) menyatakan Dana Bagi Hasil (DBH) merupakan hak daerah atas pengelolaan sumber-sumber penerimaan Negara yang dihasilkan dari masing-masing daerah penghasil (*by origin*) yang didasarkan atas ketentuan perundangan yang berlaku. Sumber-sumber penerimaan perpajakan yang dibagikan meliputi Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Bumi Bangunan (PBB), dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB). Penelitian yang dilakukan Bugis menyimpulkan bahwa Dana Bagi Hasil berpengaruh signifikan terhadap Pertumbuhan Ekonomi. Hal ini bermakna bahwa apabila terjadi kenaikan nilai pendapatan daerah tersebut maka akan menyebabkan peningkatan pula pada capaian pertumbuhan ekonomi.

Berdasarkan uraian sebelumnya, maka kerangka pemikiran penelitian dapat dilihat sebagai berikut.



**HIPOTESIS**

Berdasarkan kerangka pemikiran yang telah dijelaskan pada bagian sebelumnya, maka hipotesis yang ditemukan adalah:

Ha.1 Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umaum, dan Dana Bagi Hasil secara

bersama-sama berpengaruh positif terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Aceh.

Ha.2 Pendapatan Asli Daerah berpengaruh positif terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Aceh.

Ha.3 Dana Alokasi Umum berpengaruh positif terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Aceh.

Ha.4 Dana Bagi Hasil berpengaruh positif terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Aceh.

## METODE PENELITIAN

Yang menjadi tujuan dari penelitian ini adalah untuk menguji dan memperoleh bukti empiris dari pengaruh pendapatan asli daerah, dana alokasi umum dan dana bagi hasil terhadap pertumbuhan ekonomi. maka jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hipotesis. Data yang dianalisis dalam penelitian ini bersumber dari Badan Pusat Statistik yang di akses melalui website BPS masing-masing kabupaten kota berupa data PDRB, sementara untuk data APBD kabupaten dan kota Provinsi Aceh yang terdiri dari realisasi PAD, DAU dan DBH diambil dari departemen keuangan yang di akses melalui website [www.djkd.depkeu.go.id](http://www.djkd.depkeu.go.id). metode analisis data dalam penelitian ini menggunakan metode sensus adalah penggunaan analisis regresi linear berganda.

Menurut Sugiyono (2013: 277) secara matematika, regresi linear berganda dari penelitian ini sebagai berikut:

$$Y = \beta_0 + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + e$$

Keterangan:

Y	= Pertumbuhan Ekonomi
$\beta_0$	= Koefisien Konstanta
$\beta_1, \beta_2, \beta_3$	= Koefisien Regresi
$X_1$	= Pendapatan Asli Daerah
$X_2$	= Dana Alokasi Umum
$X_3$	= Dana Bagi Hasil
e	= Tingkat Kesalahan ( <i>error</i> )

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

### HASIL PENELITIAN

#### Deskripsi Objek Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode sensus, dimana seluruh populasi dijadikan sampel penelitian. Data yang dianalisis berupa data *cross section* sebanyak 23 kabupaten/kota dan data *time series* sebanyak 4 tahun pengamatan. Dalam penelitian ini menggunakan metode sensus tanpa menggunakan kriteria-kriteria yang ditentukan.

#### Uji Statistik Deskriptif

Uji statistik deskriptif bertujuan memberikan gambaran atau deskriptif suatu data yang dilihat dari nilai rata-rata (mean), standar deviasi, varian, maksimum, dan minimum (Ghozali, 2013:19). Uji

statistik deskriptif secara jelas dapat dilihat pada Tabel 1 perhitungan nilai menggunakan dalam jutaan rupiah.

Tabel 1 menunjukkan bahwa PAD memiliki nilai rata-rata Rp.45.486.134,70 dengan standar deviasi Rp.40.807.288,34 PAD tertinggi diperoleh Kabupaten Aceh Utara pada tahun 2011 sebesar Rp. 176.550.865 PAD terendah diperoleh Kota Subulussalam pada tahun 2011 Rp. 6.099.446. Sementara DAU rata-rata Rp.429.811.086,0 dengan standar deviasi Rp. 135.494.276,9 DAU tertinggi didapat Kabupaten Bireuen pada tahun 2014 sebesar Rp. 770.780.031 dan DAU terendah sebesar Rp. 181.919.378 diperoleh Kota Subulussalam pada tahun 2011.

Untuk DBH rata-rata sebesar Rp. 66.400.169,32 dengan standar deviasi sebesar Rp. 103.635.162,1 DBH terendah dimiliki Kota Subulussalam pada tahun 2014 yaitu sebesar Rp. 20.145.562 dan Kabupaten Aceh Utara memiliki DBH tertinggi sebesar Rp. 511.392.051 pada tahun 2013. Sementara pertumbuhan ekonomi selama pengamatan rata-rata Rp. 4.441.344, 48 dengan standar deviasi sebesar Rp. 3.124.009, 05 pertumbuhan ekonomi tertinggi sebesar Rp.13.088.020 dicapai oleh Kabupaten Aceh Utara pada tahun 2011. Sementara pertumbuhan ekonomi terendah adalah Kota Sabang sebesar Rp. 803.252 pada tahun 2011.

#### Hasil Pengujian Regresi Linear Berganda

Untuk menguji pengaruh pendapatan asli daerah, dana alokasi umum, dan dana bagi hasil terhadap pertumbuhan ekonomi di provinsi Aceh baik secara simultan maupun parsial digunakan metode analisis regresi linear berganda. Berdasarkan uji hipotesis yang telah dilakukan dengan menggunakan bantuan program IBM SPSS (*statistical product and service solution*) versi 22.0 pengaruh masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen secara rinci dapat dilihat pada Tabel 2

Berdasarkan hasil regresi linear berganda yang telah diperoleh dalam penelitian ini, maka akan dibahas pengaruh variabel independen terhadap dependen. Pengaruh pendapatan asli daerah, dana alokasi umum, dan dana bagi hasil terhadap pertumbuhan ekonomi.

#### Koefisien Deteminasi

Menurut hasil uji model regresi, nilai koefisien ( $R^2$ ) pada penelitian ini adalah sebesar 0,697. Angka ini tidak cenderung mendekati 1, angka ini menunjukkan hampir sebagian besar informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi variabel dependen tidak dapat diberikan oleh model atau variabel-variabel independen.

Pada Tabel 3 dapat dilihat bahwa nilai R Square diperoleh sebesar 0,697 atau 69,7%. Artinya 69,7% pertumbuhan ekonomi dapat dijelaskan oleh

ketiga variabel independen dalam penelitian ini. Nilai R pada Tabel 3 sebesar 0,835 atau 83.5%. Artinya dalam penelitian ini hubungan antara variabel kuat.

### HASIL PENGUJIAN HIPOTESIS

Pengujian hipotesis ini menggunakan metode analisis regresi linear berganda, untuk menguji hipotesis yang telah diajukan maka dilakukan pengujian secara simultan dan parsial.

#### Pengujian Hipotesis Secara Simultan

Pengujian secara simultan dilakukan untuk mengetahui ada tidaknya pengaruh variabel dependen terhadap variabel independen yang ditentukan berdasarkan rancangan pengujian hipotesis sebagai berikut:

$H_0$ :  $\beta_1 = \beta_2 = \beta_3 = 0$ ; Pendapatan asli daerah, dana alokasi umum, dan dana bagi hasil secara simultan tidak berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi di Provinsi Aceh.

$H_a$ : Paling sedikit ada satu  $\beta_i \neq 0$ ,  $i = 1, 2, 3$ ; Pendapatan asli daerah, dana alokasi umum dan dana bagi hasil secara simultan berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi di Provinsi Aceh

Berdasarkan Tabel 2 didapatkan koefisien regresi PAD 0,008; DAU sebesar 0,002 dan DBH sebesar 0,000. Hal tersebut menunjukkan bahwa  $\beta_i \neq 0$ , dimana  $\beta_1 = 0,008$ ;  $\beta_2 = 0,002$  dan  $\beta_3 = 0,000$  sehingga  $H_a$  dapat diterima. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa PAD, DAU, dan DBH secara bersama-sama berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi di provinsi Aceh.

#### Pengujian Hipotesis Secara Parsial

Pengujian secara parsial bertujuan untuk melihat pengaruh masing-masing variabel independen (Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum dan Dana Bagi Hasil) terhadap variabel dependen. Pengujian secara parsial dapat dilihat pada Tabel 2

#### Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Aceh

Berdasarkan rancangan pengujian hipotesis yang telah ditentukan sebelumnya, maka hipotesis pengaruh Pendapatan Asli Daerah terhadap Pertumbuhan Ekonomi dirumuskan sebagai berikut:

$H_{01}$ :  $\beta_1 = 0$ ; Pendapatan asli daerah tidak berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi di Provinsi Aceh.

$H_{a1}$ :  $\beta_1 \neq 0$ ; Pendapatan asli daerah berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi di Provinsi Aceh.

Berdasarkan Tabel 2, pendapatan asli daerah mempunyai nilai  $\beta_1 = 0,008$  sehingga dapat disimpulkan bahwa  $H_{a1}$  diterima. Dengan demikian

dapat disimpulkan bahwa PAD berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi.

#### Pengaruh Dana Alokasi Umum Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Aceh

Berdasarkan rancangan pengujian hipotesis yang telah ditentukan sebelumnya, maka hipotesis pengaruh dana alokasi umum terhadap Pertumbuhan Ekonomi dirumuskan sebagai berikut:

$H_{02}$ :  $\beta_2 = 0$ ; Dana alokasi umum tidak berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi di Provinsi Aceh.

$H_{a2}$ :  $\beta_2 \neq 0$ ; Dana alokasi umum berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi di Provinsi Aceh.

Berdasarkan Tabel 2, dana alokasi umum mempunyai nilai  $\beta_2 = 0,002$  sehingga dapat disimpulkan bahwa  $H_{a2}$  diterima. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa DAU berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi.

#### Pengaruh Dana Bagi Hasil Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Aceh

Berdasarkan rancangan pengujian hipotesis yang telah ditentukan sebelumnya, maka hipotesis pengaruh dana bagi hasil terhadap Pertumbuhan Ekonomi dirumuskan sebagai berikut:

$H_{03}$ :  $\beta_3 = 0$ ; Dana Bagi Hasil tidak berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi di Provinsi Aceh.

$H_{a3}$ :  $\beta_3 \neq 0$ ; Dana Bagi Hasil berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi di Provinsi Aceh.

Berdasarkan Tabel 2, dana bagi hasil mempunyai nilai  $\beta_3 = 0,000$  sehingga dapat disimpulkan bahwa  $H_{a3}$  diterima. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa DBH berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi.

### HASIL PEMBAHASAN

#### Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Dana Bagi Hasil terhadap Pertumbuhan Ekonomi

Berdasarkan hasil regresi berganda secara bersama-sama menunjukkan bahwa pendapatan asli daerah, dana alokasi umum, dan dana bagi hasil terhadap pertumbuhan ekonomi. Hasil ini sesuai dengan hipotesis yang telah dibuat, secara simultan pendapatan asli daerah, dana alokasi umum, dan dana bagi hasil terhadap pertumbuhan ekonomi.

Tabel 2 menunjukkan nilai regresi pendapatan asli daerah, dana alokasi umum, dan dana bagi hasil terhadap pertumbuhan ekonomi. Nilai yang dipengaruhi oleh pertumbuhan ekonomi 0,008, 0,002, dan 0,000. Nilai koefisien ini menunjukkan bahwa koefisien regresi pendapatan asli daerah, dana alokasi umum, dan dana bagi hasil tidak sama dengan nol ( $\beta_1 \neq 0$ ,  $\beta_2 \neq 0$ , dan  $\beta_3 \neq 0$ ).

Berdasarkan rancangan pengujian hipotesis, syarat untuk menyatakan pendapatan asli daerah, dana alokasi umum, dan dana bagi hasil secara simultan berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi adalah jika paling sedikit ada satu  $t_i=0;(i=1,2,3)$ . Hasil penelitian ini menolak  $H_0$  dan menerima  $H_a$ . Dengan demikian dapat dikatakan bahwa pendapatan asli daerah, dana alokasi umum, dan dana bagi hasil secara simultan berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi di Provinsi Aceh.

#### **Pengaruh Pendapatan Asli Daerah terhadap Pertumbuhan Ekonomi**

Berdasarkan Tabel 2 nilai koefisien regresi PAD terhadap pertumbuhan ekonomi sebesar 0,008. Dalam rancangan pengujian hipotesis, syarat untuk menyatakan bahwa PAD berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi jika  $t_1 > 0$ . Oleh karena itu, hasil penelitian ini menolak  $H_0$  dan menerima  $H_a$ . Kesimpulannya, PAD berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi di Provinsi Aceh.

Berdasarkan hasil pengujian, nilai positif koefisien regresi PAD sebesar 0,008 yang berarti PAD memiliki pengaruh searah dengan pertumbuhan ekonomi. Kesimpulannya, semakin tinggi dana PAD yang direalisasikan maka akan semakin tinggi pertumbuhan ekonomi. Sebaliknya, semakin rendah dana PAD yang direalisasikan maka akan semakin rendah pertumbuhan ekonomi. Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian Abdullah, Mawarni dan Dawarnis (2013), dengan judul Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Dan Dana Alokasi Umum Terhadap Belanja Modal Serta Dampaknya Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Daerah (Studi Pada Kabupaten Dan Kota Di Aceh) bahwa PAD berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi.

#### **Pengaruh Dana Alokasi Umum terhadap Pertumbuhan Ekonomi**

Berdasarkan Tabel 2 nilai koefisien regresi dana alokasi umum terhadap belanja pertumbuhan ekonomi sebesar 0,002. Dalam rancangan pengujian hipotesis, syarat untuk menyatakan bahwa dana alokasi umum berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi jika  $t_2 > 0$ . Oleh karena itu, hasil penelitian ini menolak  $H_0$  dan menerima  $H_a$ . Kesimpulannya, dana alokasi umum berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi di Provinsi Aceh.

Berdasarkan hasil pengujian, nilai positif koefisien regresi dana alokasi umum sebesar 0,002 yang berarti dana alokasi umum memiliki pengaruh searah dengan pertumbuhan ekonomi. Kesimpulannya, semakin tinggi dana alokasi umum yang direalisasikan maka akan semakin tinggi pertumbuhan ekonomi. Sebaliknya, semakin rendah dana alokasi umum yang direalisasikan maka akan semakin rendah juga

pertumbuhan ekonomi. Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian Abdullah, Mawarni dan Dawarnis (2013), dengan judul Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Dan Dana Alokasi Umum Terhadap Belanja Modal Serta Dampaknya Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Daerah (Studi Pada Kabupaten Dan Kota Di Aceh) bahwa dana alokasi umum berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi.

#### **Pengaruh Dana Bagi Hasil terhadap Pertumbuhan Ekonomi**

Berdasarkan Tabel 2 nilai koefisien regresi dana bagi hasil terhadap pertumbuhan ekonomi sebesar 0,000. Dalam rancangan pengujian hipotesis, syarat untuk menyatakan bahwa dana bagi hasil berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi jika  $t_3 > 0$ . Oleh karena itu, hasil penelitian ini menolak  $H_0$  dan menerima  $H_a$ . Kesimpulannya, dana bagi hasil berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi di Provinsi Aceh.

Berdasarkan hasil pengujian, nilai positif koefisien regresi dana bagi hasil sebesar 0,000 yang berarti dana bagi hasil memiliki pengaruh searah dengan pertumbuhan ekonomi. Kesimpulannya, semakin tinggi dana bagi hasil yang direalisasikan maka akan semakin tinggi pertumbuhan ekonomi. Sebaliknya, semakin rendah dana bagi hasil yang direalisasikan maka akan semakin rendah juga pertumbuhan ekonomi. Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian Bugis, Muhammad (2012), dengan judul Pengaruh Dana Perimbangan Terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Provinsi Maluku Periode Tahun 2002-2009 bahwa dana bagi hasil berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi.

#### **KESIMPULAN**

Berdasarkan pembahasan hasil penelitian yang telah diuraikan sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa:

1. Variabel pendapatan asli daerah, dana alokasi umum dan dana bagi hasil secara bersama-sama (simultan) berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi di Provinsi Aceh tahun 2011-2014.
2. Variabel pendapatan asli daerah, dana alokasi umum dan dana bagi hasil secara masing-masing (parsial) berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi di Provinsi Aceh tahun 2011-2014.
3. Variabel pendapatan asli daerah berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi di Provinsi Aceh tahun 2011-2014.
4. Variabel dana alokasi umum berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi di Provinsi Aceh tahun 2011-2014.
5. Variabel dana bagi hasil berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi di Provinsi Aceh tahun 2011-2014.

## KETERBATASAN PENELITIAN

Penelitian ini mempunyai beberapa kelemahan yang membatasi kesempurnaannya. Oleh karena itu, keterbatasan dalam penelitian ini perlu diperhatikan agar penelitian selanjutnya diperoleh hasil yang lebih baik. Adapun keterbatasan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Pendeknya rentang waktu penelitian, yaitu dari tahun 2011-2014 diduga turut mempengaruhi hasil penelitian, karena umumnya pertumbuhan ekonomi atau peningkatannya akan lebih terlihat dalam rentang waktu beberapa tahun.
2. Dalam hal variabel penelitian, ketiga variabel yang diteliti berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi yaitu PAD, DAU, dan DBH.
3. Minimnya teori yang spesifik tentang pertumbuhan ekonomi dan terbatasnya sumber referensi.

## SARAN

Dengan melihat hasil penelitian serta keterbatasan-keterbatasan dalam penelitian ini, maka disarankan sebagai berikut:

1. Kepada Pemerintah Provinsi Aceh:
  - a. Supaya lebih mengintensifkan sumber-sumber pendapatan asli daerah guna meningkatkan pertumbuhan ekonomi, karena peningkatan pendapatan asli daerah secara langsung sangat berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi yang pada akhirnya akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
  - b. Supaya memprioritaskan alokasi DAU dan DBH pada bidang-bidang yang langsung bersentuhan dengan kepentingan publik, seperti infrastruktur atau fasilitas-fasilitas yang dapat mendorong pertumbuhan ekonomi.
2. Kepada peneliti yang tertarik di bidang ini disarankan
  - a. Untuk mengambil sampel yang lebih banyak dengan rentang waktu lebih lama dan menambahkan variabel-variabel lainnya seperti belanja modal dan otsus.

## DAFTAR PUSTAKA

Abdullah, S. Mawarni dan Darwanis. 2013. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum terhadap Belanja Modal serta Dampaknya terhadap Pertumbuhan Ekonomi Daerah (Studi pada Kabupaten dan Kota di Aceh). *Jurnal Akuntansi Pascasarjana Universitas Syiah Kuala* Vol 2 No 2 Mei 2012 ISSN 2302-0164.

Berita Resmi Badan Pusat Statistik Aceh. 2015. *Pertumbuhan Ekonomi Aceh tahun 2014*. 5 Februari.

Bugis, M. 2012. Pengaruh Dana Perimbangan terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Provinsi Maluku Periode Tahun 2002-2009. *ManeksiJurnal Manajemen Ekonomi & Akuntansi* Vol 1 No 1 Ambon Desember 2012 ISSN 2302-9560.

Djaenuri, A. 2012. *Hubungan Keuangan Pusat – Daerah*. Bogor: Ghalia Indonesia.

Dwirandra, A.A.N.B dan IGA. 2013 Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi pada Belanja Modal dengan PAD dan DAU sebagai Variabel Moderasi. *E-jurnal Akuntansi Universitas Udayana* 4.3 ISSN 2302-8556.

Ghozali, I. 2013. *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program SPSS*. Badan Penerbit Universitas Diponegoro: Semarang.

Gunantara, P. C. & Dwirandra. 2014. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum pada Pertumbuhan Ekonomi dengan Belanja Modal sebagai Variabel Pemoderasi di Bali. *E-jurnal Akuntansi Universitas Udayana* 7.3 ISSN 2302-8556.

Hermanto. 2015. *BPS: Ekonomi Aceh Terpuruk*. Melalui <<http://www.atjehkutaraja.com/indek.php/2015/05/06/bps-ekonomi-aceh-terpuruk>>.Diakses 03 Juni 2015.

Katalog Badan Pusat Statistik. 2014. *Publikasi Aceh Dalam Rangka 2014*.

Endrawati dan Ulfi M. 2010. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) terhadap Pertumbuhan Ekonomi: Studi Kasus Sumatera Barat. *Jurnal Akuntanasi & Manajemen* Vol 5 No.2 Desember 2010 ISSN 1858- 3687.

Republik Indonesia. Peraturan Pemerintah No 55 Tahun 2005 *tentang Dana Perimbangan*.

\_\_\_\_\_, Republik Indonesia. Undang-Undang No 23 Tahun 2014 *tentang Pemerintahan Daerah*.

\_\_\_\_\_, Republik Indonesia. Undang-Undang No 33 Tahun 2004 *tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah*.

Sugiyono. 2013. *Statistik Untuk penelitian*. Bandung: Alfabeta.

Sukirno, S. 2013. *MakroEkonomi Teori Pengantar*. Jakarta: Rajawali Pers.

Www.suaramerdeka.com. Diakses pada 10 Desember 2015.

[Www.aceh.bps.go.id](http://www.aceh.bps.go.id).

[Www.djkd.depdagri.go.id](http://www.djkd.depdagri.go.id).

[Www.djpk.depkeu.go.id](http://www.djpk.depkeu.go.id).

**Tabel 1**  
**Statistik Deskriptif**

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
PAD	92	6099446,00	176550865,00	45486134,70	40807288,34
DAU	92	181919378,00	770780301,00	429881086,0	135494276,9
DBH	92	20145562,00	511392051,00	66400169,32	103635162,1
PE	92	803252,00	13088020,00	4441344,4898	3124009,054
Valid N (listwise)	92				

Sumber: Data Diolah (2016)

**Tabel 2**  
**Regresi Linear Berganda**

Model	Unstandardized coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	226289,3	432798,8		,523	,602
PAD	,008	,004	,264	1,853	,067
DAU	,002	,001	,171	1,244	,217
DBH	,000	,001	-,020	-,188	,851

Sumber: Data Diolah (2016)

**Tabel 3**  
**Koefisien Determinasi (R<sup>2</sup>)**

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,835 <sup>a</sup>	,697	,687	1747617,17

Sumber: Data Diolah (2016)